

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
SECARA NON TUNAI (E WARONG) OLEH DINAS SOSIAL DAN
PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau

Ria Safitri

NPM : 157110024

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ria Safitri
 Npm : 157110024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferenshif.

Pekanbaru, 15 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Dia Meirina Suri S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Ria Safitri
 Npm : 157110024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 15 April 2019

Ketua,

Sekretaris,

Nurmasari, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Anggota,

Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Anggota

M. Faisal Amrillah, S.Sos., M.Si

Mengetahui,

Wakil Dekan I

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ria Safitri
 Npm :157110024
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Administrasi Publik
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa Bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 15 April 2019

An. Tim Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Nurmasari, S.Sos., M.Si

Ema Fitri Lubis, S.Sos., M.Si

Turut Mengetahu,

Program Studi Administrasi Publik

Wakil Dekan I

Prodi Ilmu Administrasi

Ketua,

Dr.H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.

Hendy Andry, S. Sos.,M.Si

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL
SECARA NON TUNAI (E WARONG) OLEH DINAS SOSIAL DAN
PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Ria Safitri

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Program;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat obyektif Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Indikator penilaian yang digunakan yaitu Faktor pendorong dan Faktor Penghambat yang meliputi item penilaian yaitu komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana, dukungan kelompok kepentingan, Aktor yang terlibat, Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda, Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, Faktor lain. Tipe penilaian adalah tipe survei deskriptif, yaitu peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Terdapat dua kelompok populasi sampel pada penelitian ini yaitu Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini yaitu masyarakat pengelola E-Warong dan Masyarakat Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu teknik purposive sampling, menurut Sugiyono (2010) teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru berada pada interval penilaian Cukup Terimplementasi. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan yaitu dinas Sosial hendaknya memberikan sosialisasi mengenai program dan dapat melakukan pengawasan secara rutin, sehingga aktivitas masyarakat dapat terpantau.

**IMPLEMENTATION OF NON-CASH (E WARONG) SOCIAL ASSISTANCE
PROGRAM POLICY BY THE SOCIAL AND COMMUNITY SERVICE OF
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Ria Safitri

Keywords: Implementation, Policy, Program;

This study aims to determine the objective level of the Implementation of Non-Cash (E Warong) Social Assistance Program by the Social Service and Cemetery of Pekanbaru City. Assessment indicators that are used are driving factors and inhibiting factors which include assessment items, namely pilitik leadership commitment, organizational ability, commitment of the implementers, interest group support, actors involved, presence of commitment or multiple loyalty, complexity of time and changes in leadership too much, another factor. The type of assessment is a type of descriptive survey, that is the researcher treats data collection, for example by distributing questionnaires, tests, structured interviews, and so on. There are two sample population groups in this study, namely the Social Empowerment and the Poor and the Community Section. The community in this case is the E-Warong management community and the beneficiaries of the Non-Cash Food Aid. The sampling technique used was purposive sampling technique, according to Sugiyono (2010) a technique for determining research samples with certain considerations aimed at making the data obtained later more representative. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Implementation of the Non-Cash (E Warong) Social Assistance Program Policy by the Office of Social Affairs and Cemetery of the City of Pekanbaru was in the evaluation interval. Recommendations that need to be considered are that the Social Service office should provide information on the program and can carry out supervision regularly, so that community activities can be monitored.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampung penyelesaian Skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E-Warong) Oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru”**. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi Sini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafriadi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

4. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dan selalu mendukung, menyemangati serta mengingatkan penulis apabila lalai dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Dia Meirina Suri S.Sos., M.Si yang juga selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar untuk meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran serta selalu memotivasi dan juga mengingatkan penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini serta menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang mana telah mendidik dan memberikan dorongan serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Seluruh staf, karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.
8. Kepada Ayahnda dan Ibunda terimakasih telah memberikan dukungan materil maupun moral. Seta terimakasih kepada sel;uruh keluarga yang telah memberikan motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi.
9. Teman-teman seangkatan progrm studi Administrasi Publik angkatan 2015.

Semoga tuhan memberikan pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis harapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan Skripsi ini.

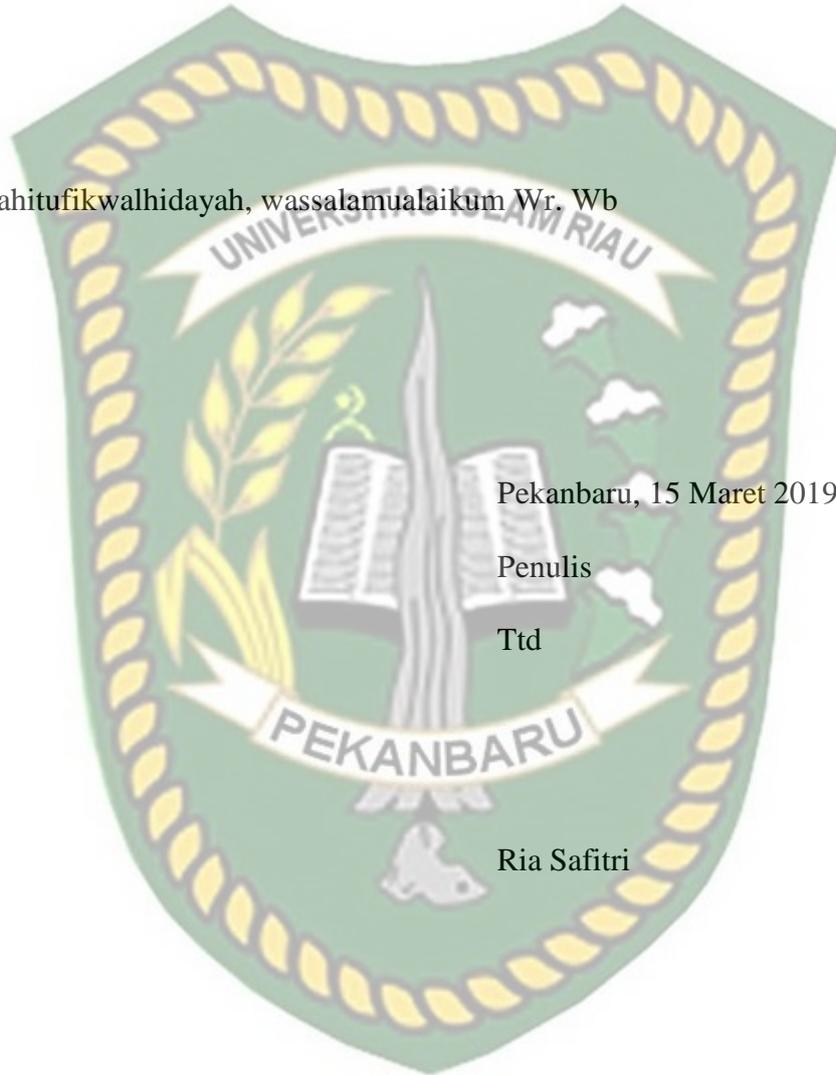
Wabillahitufikwalhidayah, wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 15 Maret 2019

Penulis

Ttd

Ria Safitri



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II STUDI KEPUSTAKAAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan	16
1. Konsep Administrasi	16
2. Konsep Organisasi	18
3. Konsep Manajemen	18
4. Konsep Kebijakan publik	20
5. Konsep Implementasi Kebijakan	22
6. Konsep Implementasi Program	27
7. Bantuan Sosial	33
B. Kerangka Pemikiran	35
C. Konsep Operasional	35
D. Operasionalisasi Variabel	38
E. Teknik Pengukuran	39

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Teknik Penarikan Sampel	44
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru.....	49
B. Geografis.....	50
C. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota pekanbaru	52
D. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	53
E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	56
F. Uraian Tugas Bagian Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	56
G. Visi Misi Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Identitas Responden	61
B. Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru	64
C. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.....	95
BAB VI PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
DAFTAR KEPUSTAKAAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi dapat dipahami berdasarkan dua sudut pandang yaitu administrasi secara sempit dan administrasi secara luas. Administrasi secara sempit merupakan kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberian nomor atau kode surat, pengiriman berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi. Sedangkan administrasi secara luas merupakan proses (rangkai) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang serta terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan wadah atau tempat, dimana wadah atau tempat itu adalah sebuah organisasi.

Menurut Melayu S.P. Hasibuan (2001:120) berpendapat bahwa, organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.

Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang ditentukan dalam ikatan yang terdapatseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama agar tercapai secara efektif dan efisien maka diperlukan manajemen yang mengelolanya, dengan

adanya manajemen yang mengatur atau mengarahkan pelaksanaan kegiatan maka tujuan akan mudah dicapai.

Menurut Andrew F. Sikula (dalam Melayu S.P Hasibuan, 2001;2) manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk dan jasa secara efisien.

Dalam organisasi publik terdapat administrasi publik yang bertugas memberikan pelayanan publik dan kebijakan publik untuk masyarakat, diiringi manajemen yang baik sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Serta segala kebijakan yang dibuat pemerintah mampu membawa perubahan yang baik bagi masyarakat yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada masa reformasi seperti ini peranan dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional hal ini merupakan tanda-tanda keberhasilan pembangunan sosial. Menurut undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Merupakan kewenangan yang melekat pada daerah Kab/Kota oleh karenanya dalam pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang etpat. Untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial tersebut didukung pula dengan adanya Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Tujuan negara sebagaimana termaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan disegala bidang yang pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia juga memiliki sejumlah permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah baik sosial maupun ekonomi yang akan terus-menerus mengikuti laju pembangunan dan pertumbuhan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah rumit, demikian pelitnya seakan-akan menjadi persoalan abadi yang senantiasa berputar. Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan sangat kompleks sifatnya mengingat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan seperti aspek psikologi, aspek sosial budaya, aspek hukum, dan aspek keamanan.

Namun pemerintah selalu melakukan upaya penanganan kemiskinan yang terjadi, salah satu program pemerintah dalam Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin seperti dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”, dan “Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai”, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Pasal 2, (1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. (2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.

Seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan: 1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dalam meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat

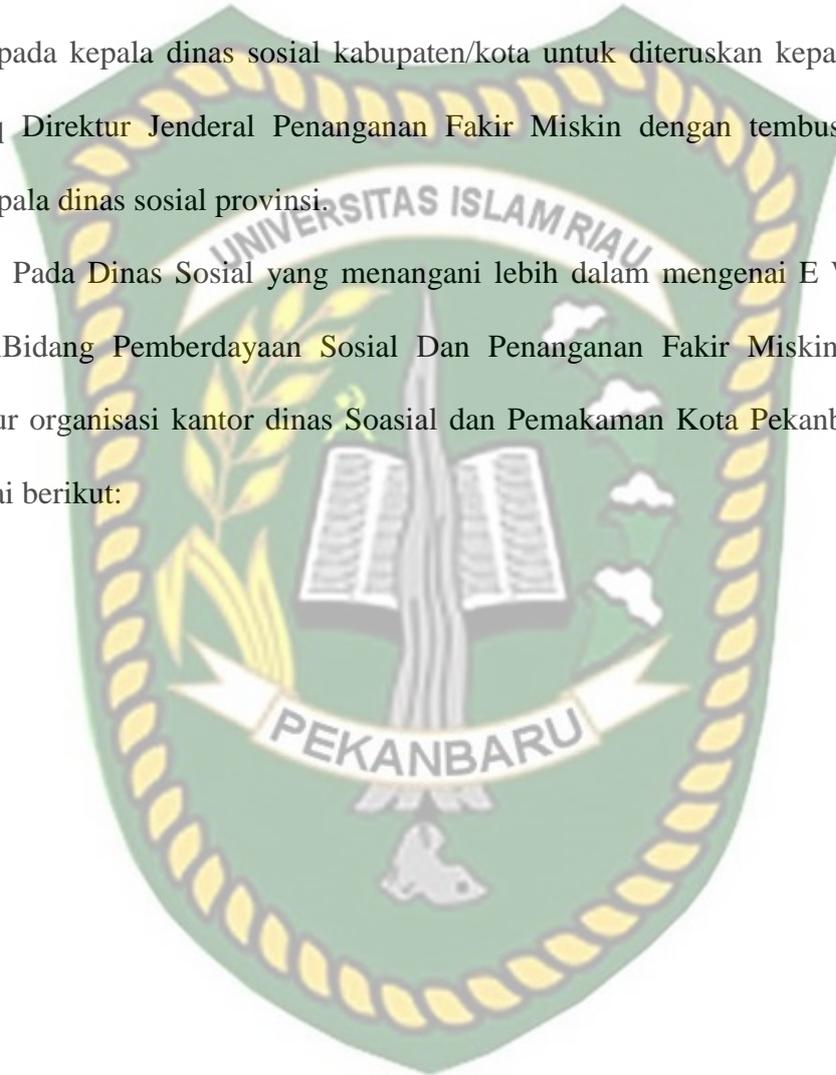
miskin, perlu dilakukan pemberian bantuan sarana usaha berupa stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha dari Pemerintah. Oleh karena itu pemerintah membuat program Bantuan Sosial dalam Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Dalam penelitian ini penulis lebih terfokus pada Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Dinas Sosial bertugas dalam pelaksanaan E Warung berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yaitu srbagai berikut:

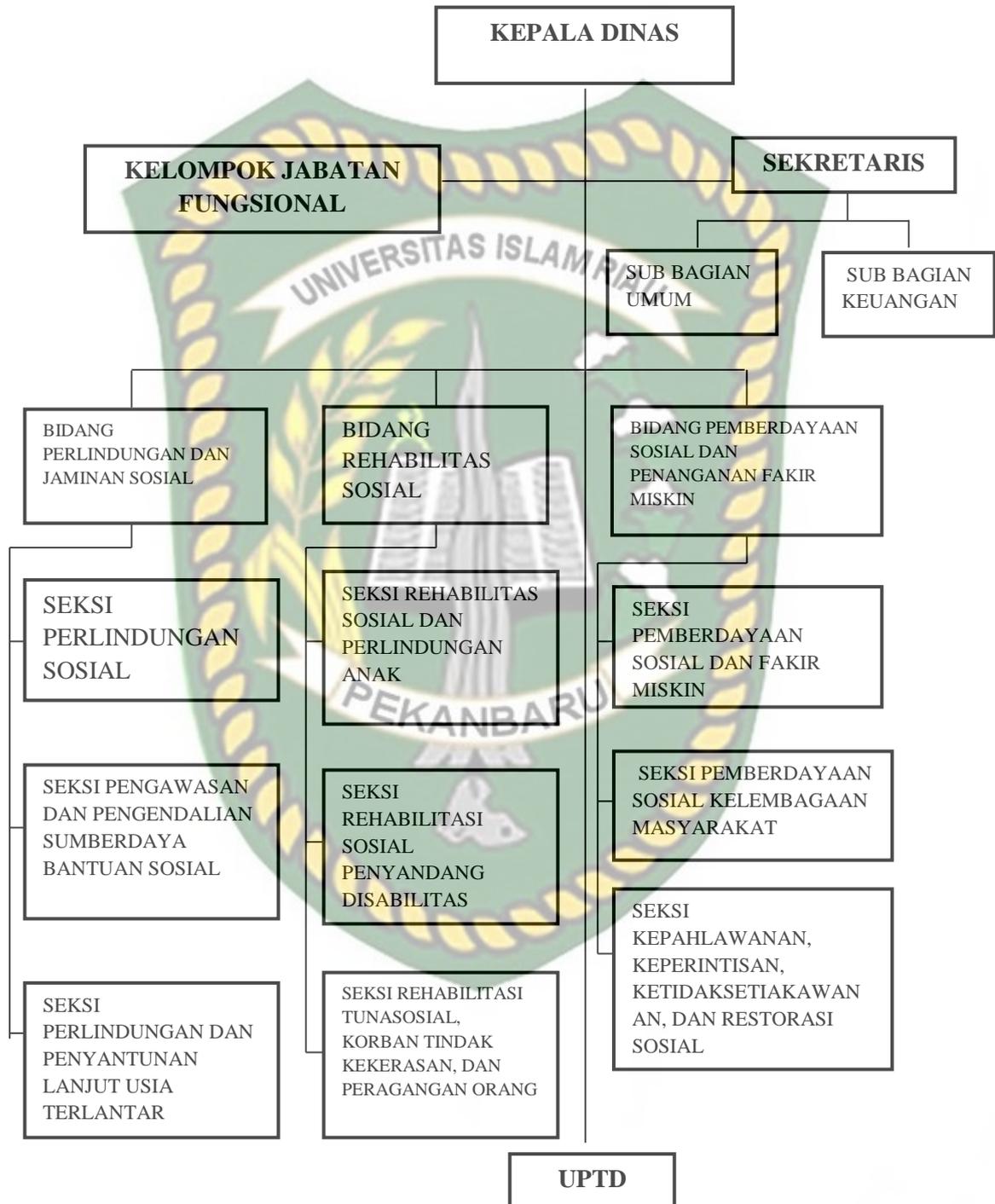
1. Sebagai instansi yang menangani permasalahan dalam pelaksanaan pembentukan E Warung, seperti pada pasal 9 ayat 3 yaitu : “Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi”.
2. Dalam pembentukan E-Warung KUBE PKH harus melalui Dinas Sosial seperti pada Pasal 12 yaitu : “Dinas sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan e-Warung KUBE PKH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin”.

3. Dinas Sosial berperan dalam melaksanakan koordinasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, berdasarkan pasal 28 ayat 2 yaitu : “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua KUBE Jasa dan penyelia kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Pada Dinas Sosial yang menangani lebih dalam mengenai E Warong ini adalah Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin. Adapun struktur organisasi kantor dinas Soasial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas, bidang yang menjalankan atau yang menangani Program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini adalah bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yaitu seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 97 Tahun 2016 pada Pasal 35 yaitu seksi pemberdayaan sosial keluarga miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasala 34 menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun program kerja
- b. Pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin;
- c. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha keluarga binaan sosial;
- d. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- e. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan Program Bantuan Keluarga Miskin;
- f. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.

Beberapa program yang ada pada Dinas Sosial terutama dalam Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan Fakir Miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT), dan E Warong KUBE PKH.

Adapun petunjuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan dasar hukum yang ada adalah sebagai berikut:

1. Prinsip bantuan Non Tunai
 - a. Semua penerima bantuan akan memiliki rekening tabungan bank
 - b. Semua bantuan sosial (tunai dan e vouchery akan masuk kedalam rekening tersebut).
 - c. Pencairan bantuan oleh penerima manfaat.
 - d. Dilakukan dengan menggunakan teknologi moda transaksi.
2. Kepesertaan
 - a. Keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2017 adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, berdasarkan undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
 - b. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah data terpadu program penanganan Fakir miskin (DT-PFM) yang merupakan hasil pemutakhiran basis data terpadu di tahun 2015.
 - c. Daftar penerima manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang namanya termasuk didalam DPM yang ditetapkan oleh menteri sosial RI. DPM kemudian diserahkan kepada bank penyalur dan pemerintah daerah oleh kementerian sosial, yang ditetapkan dengan Menteri Sosial RI. Dan akan dilakukan verifikasi dan validasi sosial dikecamatan dan kelurahan.

d. Akun elektronik bantuan pangan diutamakan atas nama perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau pasangan kepala keluarga.

3. Besaran Manfaat :

Besaran manfaat bantuan pangan Non Tunai Adalah Rp. 110.000,- /KPM/ bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/gula di e-warong, maka nilai bantuan tetap tersimpn dan terakumulasi dalam akun elektronik bantuan pangan.

4. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) :

- a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhn pangan.
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang
- c. Meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan pangan bagi KPM.
- d. Memberikan KPM lebih banyak pilihan dan kendali dalam pemenuhan kebutuhan pangan,
- e. Mendorong tercapainya tujuan pembanguana berkelanjutan (sustainable depelopment goals / SDG's).

Untuk setiap KPM, daftar KPM memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama pasangan keluarga (calon pemilik rekening).
2. Nama kepala keluarga
3. Nama anggota keluarga lainnya
4. Alamat tinggal keluarga
5. Nomor induk kependudukan (NIK)
6. Kode unik keluarga dalam DT-PPFM
7. Nama gadis Ibu kandung
8. Nomor peserta PKH

Dalam upaya mensejahterakan rakyat pemerintah memberikan program bantuan pangan non tunai yang berupa elektronik warung gotong royong (E-Warong). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama rogram Keluarga Harapan. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Pada pasal 2 peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Pembentukan e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial. Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan e-Warong KUBE PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Tempat / Lokasi E-Warong KUBE
 - a. Wilayah adminstrasi kelurahan
 - b. Mudah diakses
 - c. E-warong brtempat dirumah peserta PKH yang telah ditunjuk, yang sudah menerma maupun belum menerima batuan KUBE.

- d. Tempat yang dijadikan E- Warong KUBE harus milik sendiri.
 - e. Lokasi sasaran E-warong KUBE diutamakan berada diwilayah yang jumlah anggota KUBE, peserta PKH dan penerima KPS/KKS banyak.
 - f. Tersedia listrik dan IT, serta jaringan bagus untuk memanfaatkan EDC.
2. Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan:
- a. membentuk KUBE Jasa; dan
 - b. memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.
 - c. Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia.
 - d. Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan.
 - e. Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
 - berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
 - telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
 - memiliki potensi dan keterampilan.
3. Tata cara pembentukan e-warong kube pkh (pasal 12)
- a. Dinas sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan e-Warong KUBE PKH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tata cara (Pasal 13):

- kepala dinas sosial kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang memuat data nama dan alamat peserta KUBE Jasa dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi;
 - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan dari dinas sosial kabupaten/kota;
 - Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin menetapkan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH;
 - hasil penetapan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota; dan
 - dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada KUBE Jasa untuk membentuk e-Warong KUBE PKH.
- c. Pada pasal 14 KUBE Jasa yang telah ditetapkan untuk dibentuk e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mengajukan proposal permohonan BPSU dan bantuan KUBE kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui dinas sosial kabupaten/kota.
- d. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi atas keberadaan KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH.
- e. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi persyaratan sebagai KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH ditetapkan sebagai penerima BPSU dan bantuan KUBE.
- f. KUBE Jasa yang telah menerima BPSU dan bantuan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembentukan e-Warong KUBE PKH dan pelaksanaan kegiatan e-Warong KUBE PKH.
4. Pelaksanaan kegiatan E-Warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Program Keluarga Harapan (PKH) (Pasal 18) E-Warong KUBE PKH melakukan kegiatan:
- a. melayani pencairan Bantuan Sosial nontunai;
 - b. melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima Bantuan Sosial;
 - c. melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima Bantuan Sosial dan masyarakat umum;
 - d. memasarkan hasil produksi KUBE;
 - e. menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran Bantuan Sosial nontunai; dan

- f. melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

Adapun jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Jumlah E-Warong Kota Pekanbaru yang terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan Jumlah E-Warong Kota Pekanbaru.

KECAMATAN	JUMLAH KPM	JUMLAH E-WARONG
Bukit Raya	1.352	2
Lima Puluh	804	1
Marpoyan Damai	2.299	3
Payung Sekaki	1.496	2
Pekanbaru Kota	752	1
Rumbai	2.626	4
Rumbai Pesisir	2.133	4
Sail	423	1
Senapelan	1.146	1
Sukajadi	1.050	1
Tampian	2.486	4
Tenayan Raya	3.900	5
Total Jumlah	20.467	29

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2018

Tabel diatas menjelaskan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) Kota Pekanbaru sebanyak 20.467 keluarga dari 12 kecamatan yang ada. Dimana keluarga penerima manfaat tersebut merupakan anggota PKH dan memiliki kartu Program Keluarga Harapan(PKH). Serta Jumlah E-Warong di Kota Pekanbaru dari 12 kecamatan yaitu berjumlah 29 kelompok berdasarkan data yang ada pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tahun 2018. Berdasarkan data diatas penulis mengambil sampel 1 E-Warong perkecamatan, agar didapat data yang akurat dan sesuai dengan fenomena peneliti.

Oleh karena itu terlaksananya sebuah kebijakan atau program pemerintah maka dibutuhkan sebuah pelaksanaan yang sesuai. Berdasarkan beberapa peraturan yang ada terdapat beberapa permasalahan yang muncul, yaitu :

1. Terdapatnya E Warong yang berdiri tidak berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan, yaitu tidak melalui Dinas Sosial dalam mendirikan E Warong.
2. Terdapatnya E Warong yang sering tutup, ini dilihat dari survei peneliti dan berdasarkan informasi masyarakat setempat.

Dari fenomena dan permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sehingga penulis menetapkan judul penelitian sebagai berikut: **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan dalam usulan penelitian ini yaitu : **“Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru”**.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam Implementasi Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis, akademis dan empirisnya adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam hal kebijakan publik.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi Kepala Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, pegawai, dan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan sebuah program.
- c. Secara Akademis, dapat menjadikan salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Istilah administrasi secara bahasa, administrasi berasal dari kata *ad* dan *administrae*, yang berarti “membantu, melayani atau memenuhi”. Di Indonesia kita mengenal dan emaham “administrasi” dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. *Pertama*, *administrae* dari bahasa Belanda yang kita kenal sejak awal masuknya engaruh sistem Administrasi publik klasik (sistem Administrasi Negara Prancis atau sistem Administrasi Negara Eropa Barat Kontingental) yang dibawa oleh pemeritah jajahan belanda.

Istilah *administratie* dalam bahasa belanda mencakup ppengertian *stelselmatige verkrijging en verweking van gegevevs* (dalam bahasa indonesia disebut “tata usaha” atau administrasi dalam arti sempit”) administrasi sebagai ketatausahaan yang dalam bahasa inggris dipergunakan istilah *clerical work*, *paper work*, atau *ofice work* atau administrasi dalam arti sempit ialah berupa kegiatan pencatatan, pengelolaan, pengumpulan, pemberi nomor/kode surat, pengetikan, peggandaan penyimpanan (pengarsipan), pengiriman berbagai informasi yang diterima atau dikeluarkan oleh suatu organisasi/industri.

Menurut Siagian (dalan Syafri 2012;9) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antar dua orang manusia atau lebih yang

didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerjasama sekurangnya dua orang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan salah satu unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) peneglompokan orang dan pembagian tuga sekaligus tempat berlangsungnya berbagai macam aktivitas bagi pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan komitmen tertentu.

Ada begitu banyak para ahli yang memberikan pendapat mereka tentang organisasi. Salah satunya adalah Siagian (dalam Andry, 2015;14) yang menyatakan bahwa organisasi adalah setiap bentuk persekutuanantara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selain pengertian diatas menurut Siagian (2008;96), hakikatnya organisasi itu dilihat dari dua sudut pandang sebagai “proses”. Dimana ketika organisasi dipandang sebagai proses maka organisasi akan menyoroti interaksi antara orang-orang didalam organisasi itu.

Makmur (2008;108) organisasi terdiri dari dua bagian yang besar, pertama organisasi sebagai wadah atau tempat. Kedua organisasi sebagai proses yang

menggambarkan aktivitas yang akan, sedang atau yang dilaksanakan oleh manusia yang bergabung dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi salah satu variabel yang memiliki unsur yang akan diuraikan dalam bagian tersendiri berikut ini. Proses dalam organisasi adalah aktivitas yang memadai adanya kegiatan dalam organisasi tersebut. Proses organisasi menurut Robbins (1994:789) meliputi:

- a. Hubungan antar peranan, yaitu hubungan formal dan jalur organisasi antara para anggota sesuai dengan peranan masing-masing.
- b. Pengendalian, yaitu penetapan untuk menilai kemajuan rencana membandingkan hasil yang aktual yang diharapkan.
- c. Koordinasi yaitu proses dimana pemimpin mengembangkan pola yang teratur dari usaha kelompok diantara para bawahannya serta kepastian dan kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan.
- d. Pembinaan anggota yaitu usaha berencana meliputi keseluruhan organisasi untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi serta pendekatan berencana dalam proses organisasi.
- e. Sosialisasi, yaitu proses penerapan nilai dan tata kerja organisasi kepada anggota baru agar mereka berperilaku seperti yang dikehendaki oleh organisasi.

Jadi dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan, organisasi sebaiknya membangun dan menjaga hubungan dengan lingkungannya, dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa untuk mencapai tujuan organisasi selain dipengaruhi oleh lingkungan internal organisasi dapat juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal.

3. Konsep Manajemen

Dalam mengartikan dan mendefinisikan manajemen ada berbagai ragam, ada yang mengartikan dengan ketatalaksanaan, manajemen pengurusan dan lain sebagainya. Bila dilihat dari literatur-literatur yang ada, pengertian manajemen menurut Manulung (dalam Zulkifli, 2015:4) dapat dilihat dari tiga pengertian :

- a. Manajemen sebagai suatu proses
- b. Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia
- c. Manajemen sebagai ilmu (*science*) dan sebagai seni (*art*)

Manajemen sebagai suatu proses, melihat bagaimana cara orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengertian manajemen sebagai suatu proses dapat dilihat dari pengertian menurut:

1. *Encyclopedia of the Social Science*, yaitu suatu proses dimana pelaksanaan suatu tujuan tertentu dilaksanakan dan diawasi.
2. Haiman, manajemen yaitu fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan.
3. Georgy R. Terry, yaitu cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan melalui kegiatan orang lain. (dalam Zulkifli, 2015; 5).

Manajemen suatu kolektivitas yaitu merupakan suatu kumpulan dari orang-orang inilah yang disebut manajemen, sedangkan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya suatu tujuan dan berjalannya aktivitas manajemen disebut manajer.

Manajemen sebagai suatu ilmu dari seni, melihat bagaimana aktivitas manajemen yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip dari manajemen. Manajemen yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

4. Konsep Kebijakan Publik

Terdapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur politik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing para ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, walaupun pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan dapat menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan.

Laswell dan Kaplan dalam Nugroho (2011:93) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu. Sementara itu Dunn dalam Pasolong (2010:39), mengatakan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perekonomian dan lain-lain.

James Anderson (1984:3) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Kebijakan Publik (Inggris, *Public Policy*) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.. fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban penyediaan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan redistribusi, dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Terminologinya kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan , mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi ukuran tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi. Kebijakan publik tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam Prakteknya, rentetan kebijakan Publik sangat banyak, namun secara sederhana dikelompokkan menjadi tiga; seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2012;h. 131) yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.
- b. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan Menteri, Surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturab Bupati, dan Peraturan Walikota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah menteri, gubernur, bupati, dan walikota.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan aktivitas yang terlihat setelah adanya pengarahannya yang sah dari suatu program yang meliputi upaya mengelola input. Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124) mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan yang dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program. Implementasi dalam pandangan Agama Islam, yaitu

suatu tindakan atau kerja dengan tujuan merubah suatu kondisi untuk menjadi lebih baik.

Implementasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menuju perubahan tersebut, karena dengan adanya implementasi maka secara langsung adanya tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Enam indikator yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yang disampaikan oleh Donald Van Matter dan Carl Van Horn yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
- b. Sumber Daya
- c. Karakteristik Agen Pelaksana
- d. Sikap/kecenderungan (*Diposition*) para Pelaksana
- e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
- f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sehingga merasa sulit untuk memilihnya sebagai model implementasi kebijakan yang efektif untuk diterapkan.

Menurut Edwards III (dalam Effendy, 2009:86-89) untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan publik dapat digunakan 4 variabel, yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Edwar III (dalam Effendy, 2009:86-87) ada tiga hal yang penting dalam proses komunikasi yakni: kejelasan, konsistensi, substansi kebijakan harus dipahami oleh para pelaksana dengan sebaik-baiknya. Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas, akurat, dan konsisten.

Menurut Daryanto Abdullah (2013:94) komunikasi merupakan penyampaian dan pertukaran informasi sekurang-kurangnya dua pihak yang berperan sebagai pengirim (sender) dan penerima (receiver) dengan menggunakan berbagai media yang ada. Komunikasi secara lisan yakni komunikasi dengan menggunakan lisan secara langsung bersamaan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, komunikasi lisan dapat berupa komunikasi formal, misalnya pembicaraan dalam pertemuan atau rapat, maupun informal. Komunikasi tertulis dengan menggunakan mediator sebagai penyampai. Daryanto dan Abdullah (2013:95).

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Mulyadi (2015:68).

b. Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur pelaksana yang memiliki peranan yang penting dalam implementasi kebijakan oleh karena itu perlu adanya tenaga yang ahli karena implementasi kebijakan tidak akan efektif jika tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli dalam tugas-tugasnya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

c. Disposisi

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya diantara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung supaya implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik.

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan lembaga yang menjadi pelaksana kebijakan. Dalam hal ini berkenaan dengan jenjang hierarki yang terdapat dalam sebuah organisasi, dimana struktur tergambar jelas kedudukan, pembagian wewenang dan

pembagian tugas sesuai bidang kerja masing-masing sesuai dengan fungsi dasar organisasi tersebut.

Struktur birokrasi merupakan yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedur*) atau SOP, SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

6. Konsep Implementasi Program

Pengertian Program Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Westra (1989:236) mengatakan bahwa “program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya”. Siagian (dalam Westra 1989:124) mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- 2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.
- 3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.

- 4) Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungan-keuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- 5) Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
- 6) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut (Bintoro 1987:181).

Ahli lainya, yaitu Jones (1996:295) berpendapat bahwa “program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan”. Lebih lanjut Jones juga menjelaskan bahwa di dalam program dibuat beberapa aspek, yaitu mengenai:

- 1) Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
- 2) Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- 3) Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- 4) Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- 5) Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan oleh Korten (dalam Jones 1996:232) bahwa “A programme is collection of interrelated project designed to harmonize and integrated various action an activities for achieving averral policy abjectives” atau suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang berhubungan telah

dirancang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integratif untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa program tindakan yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik, jadi dalam menentukan suatu program harus dirumuskan secara matang sesuai dengan kebutuhan agar dapat mencapai tujuan melalui partisipasi dari pelaksana programnya.

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :

1. Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah. Donald P. Warwick dalam bukunya Syukur Abdullah, mengatakan bahwa dalam tahap implementasi program terdapat dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan yaitu faktor pendorong (*Facilitating conditions*), dan faktor penghambat (*Impending conditions*). (Abdullah 1988:17). Lebih lanjut Syukur (1988:398) menjelaskan bahwa pengertian dan unsur-unsur pokok dalam proses implementasi sebagai berikut :

1. Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
2. Proses implementasi dalam kenyataanya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai

“outcomes” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.

3. Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu :
 - a. Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik) akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.
 - b. Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
 - c. Adanya program yang dilaksanakan.
 - d. Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.

Menurut Donald P. Warwick (dalam Wahab, 1997:67) pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan program yaitu:

1. Faktor Pendukung (*facilitating conditions*).

Faktor pendorong adalah hal-hal yang memengaruhi suatu pelaksanaan kebijakan menjadi terlaksana bahkan menjadi berkembang, memajukan serta bermanfaat dalam sebuah kebijakan. Warwick menjelaskan faktor pendukung dalam implementasi program (*facilitating condition*) tersebut terdiri dari:

- a. Komitmen Pimpinan Politik (*commitment of political leaders*), dalam praktek adalah terutama komitmen dari pimpinan pemerintah karena pimpinan pemerintah pada hakekatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa di daerah.

- b. Kemampuan Organisasi (*organizational capacity*), dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.
- c. Komitmen Para Pelaksana (*the commitment of implementers*), salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.
- d. Dukungan kelompok kepentingan (*interest group support*), pelaksanaan kebijakan lebih sering mendapat dukungan dari kelompok kepentingan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan.

2. Faktor penghambat (*impeding conditions*).

faktor penghambat adalah beberapa hal yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan kebijakan. Sedangkan beberapa faktor yang secara teoritik dapat menimbulkan hambatan terhadap pelaksanaan program (*impeding condition*) menurut Warwick ialah:

- a. Banyaknya aktor yang terlibat, semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan semakin besar kemungkinan terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan.
- b. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda, seperti dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang

yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain, hal ini disebabkan adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi sehingga perhatian pelaksana menjadi terpecah.

- c. Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.
- d. Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.
- e. Faktor Lain yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan, terlebih jika terjadi perubahan kebijakan.

Teori dari Donald P. Warwick dipilih dalam penelitian ini karena untuk melihat faktor pendukung dan faktor penghambat

apa saja yang di temui dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

7. Bantuan Sosial

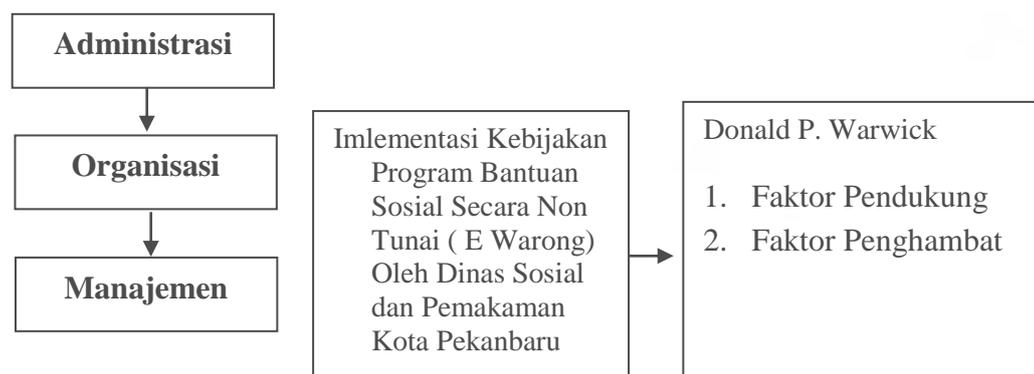
Menurut Kementerian Sosial (2011:15) bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat yang miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 (2010:79) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 (2010:79) menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan perkembangan sosial ekonomi suatu negara, program bantuan sosial yang semula hanya berbentuk hibah saja berubah orientasinya menjadi program yang lebih memberikan manfaat berkelanjutan melalui bantuan pemberdayaan atau stimulan agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri kecuali bagi sasaran program yang memang sudah tidak potensial sama sekali seperti lanjut usia yang jompo, miskin terlantar dan lain-lain. Salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan pemberian bantuan sosial kepada kepala keluarga miskin dengan

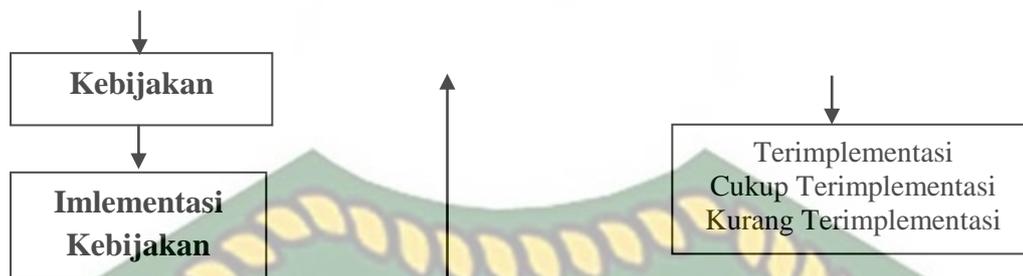
membentuk kelompok kerja yang bergabung ke dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE), diharapkan dengan model bantuan tersebut 14 dapat terentaskan kemiskinan. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat atau keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya (Kementrian Sosial, 2011:9).

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan variabel penelitian kemudian diukur dengan teori yang dijadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi maka penulis akan menjelaskan unsur tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran makna. Adapun untuk melihat implemtasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman KotaPekanbaru, penulis menggunakan konsep Menurut Donald P.Warwick (dalam Wahab,1997:67) pada implementasi terdapat dua kategori faktor yang bekerja dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan program. Atas dasar ini penulis jadika indikator dalam peneliti.

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Imlementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru





Sumber: *Modifikasi Penulis, Tahun 2018*

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah melaksanakan penelitian dan untuk menetralsir kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antar dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/ beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen dapat disimpulkan dari sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka menetapkan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan dalam organisasi.

4. Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang telah ditentukan oleh pemerintah (instansi publik) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan bertujuan untuk mengatur kepentingan seluruh anggota masyarakat.
5. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah usaha pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan melihat komunikasi untuk penyebar informasi, sumberdaya pelaksana, pemberian perintah dan struktur organisasi.
6. Kota Pekanbaru merupakan pusat Kota di Provinsi Riau.
7. Bantuan sosial dalam pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan berbagai program yang telah disusun dengan upaya untuk mensejahterakan perekonomian dan kehidupan masyarakat.
8. Elektronik warung gotong royong merupakan program pemberdayaan masyarakat dan fakir miskin yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu kementerian sosial guna untuk mensejahterakan rakyat.
9. Komitmen Pimpinan Politik adalah komitmen dari pimpinan pemerintah yang berkuasa.
10. Kemampuan Organisasi merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau program yang ditentukan
11. Komitmen Para Pelaksana adalah sikap atau tindakan pimpinan telah siap untuk diikuti.
12. Dukungan kelompok kepentingan yaitu dukungan dari kelompok atau orang yang memiliki kekuasaan dan berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan.

13. Banyaknya aktor yang terlibat adalah pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan.
14. Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda yaitu adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi.
15. Kerumitan dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.
16. Faktor Lain yaitu Waktu dan Perubahan Kepemimpinan dalam proses pelaksanaan program.

D. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Tabel II.1 : Tabel Operasionalisasi Variabel Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Skala
1	2	3	4	
“implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabatpejabat atau kelompok-	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan	a. Faktor Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen Pimpinan Politik - Kemampuan organisasi - Komitmen para pelaksana - Dukungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terimplementasi - Cukup terimplementasi - Kurang terimplementasi

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan	Pemakaman Kota Pekanbaru		kelompok kepentingan	entasi
		b. Faktor Penghambat	- Aktor yang terlibat - Terdapatnya	- Terimplementasi - Cukup

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Skala
1	2	3	4	
dalam keputusan kebijaksanaan". Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2006:124)			Komitmen atau Loyalitas Ganda - Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan - Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak - Faktor Lain	terimplementasi - Kurang terimplementasi

E. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. (sugiono, 2003:107).

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel dan indikator penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan persentase. Ukuran variabel dan indikator tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: Terimplementasi, *Cukup* Terimplementasi, dan *Kurang* Terimplementasi, kemudian ukuran tersebut dikelompokkan menurut klasifikasi data dari jenis dan bentuk sebagai dasar peneliti atas tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

Adapun pengukuran untuk masing-masing indikator variabel analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Terimplementasi : Apabila semua indikator implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Atau jumlah responden 67-100%.

Cukup Terimplementasi : apabila 2 dari 3 item penilaian indikator Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, atau jumlah responden berada pada score 34-66%.

Kurang Terimplementasi : apabila 1 dari 3 item penilaian indikator implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan jumlah responden berada pada score \leq 33%.

Sedangkan pengukuran indikator Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator faktor pendukung pada rentang nilai 67-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator faktor pendukung pada rentang nilai 34-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator faktor pendukung pada rentang nilai \leq 33%.

2. Faktor Penghambat

Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator faktor pendukung pada rentang nilai 67-100%.

Cukup Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator faktor pendukung pada rentang nilai 34-66%.

Kurang Terimplementasi : Apabila penilaian terhadap indikator faktor pendukung pada rentang nilai \leq 33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survei deskriptif yaitu menurut Sugiyono (2012:12) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur, dan sebagainya. Peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek penelitian. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang dilandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Alasannya metode penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang melibatkan pengambilan data secara statistik sehingga dapat dilakukan perhitungan dan interpretasi yang disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel dan pengujian hipotesis sehingga memberikan hasil penelitian yang aktual.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dan pada masyarakat terkait Bantuan Sosial Non Tunai E Warong. Alasan yang mengiring peneliti melakukan penelitian ditempat tersebut adalah untuk mengetahui apakah sudah terimplemetasinya sebuah program pemerintah yang dilaksanakan oleh beberapa pihak. Seperti yang terdapat pada fenomena yaitu TerdapatnyaE Warong yang berdiri tidak sesuai persyaratan pembentukan E Warong KUBE PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

C. Populasi dan Sampel

3. Populasi

Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanabrau, masyarakat Pengelola E warong, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

4. Sampel

Sampel menurut Sugiyono (2012;81) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili). Karena jika tidak representative, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik.

Dari sampel penelitian diambil dari masyarakat yang mengelola E-Warong yang menjalankan program kelompok usaha bersama diambil dari jumlah yang paling banyak yaitu Kecamatan Tenayan Raya dan masyarakat atau keluarga penerima manfaat.

Tabel III.1 : Tabel Populasi dan Sampel Penelitian Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin	1	1	100 %
2	Masyarakat Pengelola E warong	29	12	20,6%
3	Keluarga Penerima Manfaat	20.467	28	0,14%
Jumlah :		20.497	41	-

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik sensus untuk Seksi Pemberdayaan Sosial dan fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru. teknik sensus menurut Sugiyono (2012;62) yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel. Dimana keseluruhan dari jumlah populasi penulis jadikan sebagai responden, hal ini dikarenakan jumlah populasi relative sedikit yang memiliki jam kerja yang jelas sehingga mudah untuk ditemui guna pengumpulan data dalam penelitian ini, sementara itu masyarakat Pengelola E warong dan

Keluarga Penerima Manfaat dengan menggunakan teknik purposive sampling, menurut Sugiyono (2010) teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Yaitu dengan menetapkan 12 orang pengelola E-Warong dari setiap Kecamatan Kota Pekanbaru dan 28 orang Keluarga Penerima Manfaat, maka ditetapkan responden sebanyak 40 orang dari 12 Kecamatan Kota Pekanbaru dan dirasakan cukup mewakili responden yang lainnya.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk dalam deskriptif eksplanatif penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu keadaan kelompok tertentu, serta menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu fenomena dengan fenomena lainnya dimasyarakat, sedangkan eksplanati dimaksudkan untuk menemukan dan mengembangkan teori sehingga hasil atau produk penelitiannya dapat menjelaskan mengapa suatu gejala atau kenyataan sosial tertentu terjadi.

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan penelitan lapangan,yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai Imlementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

5. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, serta berkaitan dengan masalah penelitian yang dianggap perlu. Sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan penelitian termasuk undang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuisisioner

Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden. Dalam hal ini, responden yang diberikan kuisisioner adalah masyarakat Pengelola E warong, dan Masyarakat Penerima Manfaat pada Kecamatan Tenayan Raya. Pertanyaan yang diberikan melalui kuisisioner berkaitan langsung dengan indikator variabel penelitian.

Dalam penelitian ini terdapat tingkat pendidikan yang beragam, masyarakat yang akan menjadi responden diperkirakan memiliki tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan Sarjana. Dimana tingkat pendidikan ini bertujuan guna mengembangkan dan memantapkan kemampuan intelektual, kematangan psikologis dan watak seseorang dalam memberikan jawaban nantinya serta memudahkan peneliti dalam membuat pertanyaan yang sesuai.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab oleh peneliti kepada responden. Teknik ini dilakukan agar informasi yang didapatkan oleh peneliti lebih jelas dan akurat mendalam. Dan kemudian, teknik ini juga sangat bermanfaat jika diterapkan pada informan atau orang atau responden yang dianggap banyak tahu apa yang sedang diteliti oleh peneliti.

Dan peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta Kepala Pengelola E Warong. Hal-hal yang diwawancara terkait Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Secara Non Tunai (E Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru apakah sudah terimplementasi sebagaimana semestinya atau belum selanjutnya dihubungkan oleh peneliti dengan keterangan yang diberikan oleh beberapa masyarakat.

3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru, masyarakat Pengelola E warong, dan Masyarakat Penerima Manfaat.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen.

Teknik pengumpulan data sebagai data primer dalam penelitian ini penulis lakukan dengan dokumentasi wawancara secara mendalam dengan sifat struktur sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Guna melengkapi pengumpulan data primer diatas dilakukan pula pengumpulan data sekunder, pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan melalui sumber dokumentasi data dari instansi terkait, informasi pers, atau informasi relevan seperti laporan hasil penelitian sejenis, jurnal, buu dan literatur lain yang sesuai.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan informan adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012; 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisa data juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Profil Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir jauh sebelum masuknya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada zaman dahulu pekanbaru lebih dikenal dengan nama senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku yang disebut Batin. Mulanya daerah ini merupakan ladang yang lambat laun berubah menjadi daerah perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan pindah ke daerah yang baru yaitu didusun payung sekaki yang terletak di muara sungai Siak. Namun nama Payung Sekaki tidak dikenal pada masanya dan tetap disebut sebagai Senapelan. Kemudian Sultan Siak Sri Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (wafat tahun 1771) mendirikan istana di kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Sultan pun memiliki inisiatif untuk mendirikan sebuah pekan di senapelan tetapi tidak berkembang.

Usaha yang dirintis sang sultan pun dilanjutkan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali (1784-1801) ditempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar, dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekan Baharu. Pada saat ini tanggal 23 Juni memperingati sebagai hari kelahiran Kota Pekanbaru. Setelah terjadi pergantian nama, Senapelan mulai ditinggal dan diganti dengan Pekan Baharu atau

Pekanbaru dalam penyebutan sehari-hari. Berdasarkan SK kerajaan Besluit Van Her Inlanche Zelf Destuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1991, Pekabaru menjadi bagian dari kesultanan Siak dengan sebutan Distrik (Zaman Penjajahan Belanda).

Pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkkan kedalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang contoleur. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur militer yang disebut Gokung. Akhirnya setelah Indonesia Merdeka pada zaman pemerintahan Republik Indonesia Pekanbaru berubag menjadi:

1. Daerah otonom yang disebut Haminte (kota besar) dan merupakan ibu Kota Kepresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1946.
2. Kota kecil bagian dari kabupaten Kampar berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1948.
3. Kota kecil berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1956.
4. Kota Praja berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1957.
5. Ibukota Provinsi Riau setelah dipindahkan dari tanjung pinang berdasarkan kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959.
6. Kota madya berdasarkan Undang-undang No 5 tahun 1974.
7. Kota berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999

B. Geografis

Kota pekanbaru terletak antara 101° - $101\ 34^{\circ}$ Bujur Timur dan $0\ 25'$ – $0\ 45'$ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 (7

September 1987) daerah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km² menjadi 446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh Badan Pertahanan Nasional Tingkat 1 Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembionaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah kecamatan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No # Tahun 2003 yang semulanya berjumlah 8 kecamatan menjadi 12 kecamatan dan pembentukan kelurahan/desa baru yangsemulanya berjumlah 8 kecamatan menjadi 12 kelurahan/desa menjadi 58 kelurahan/desa berdasarkan Perda Kota pekanbaru No. 4 Tahun 2003. Secara umum kota pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kmpar dan Kabupaten Pelelawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelelawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru yang keadaannya relative merupakan daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial bergelombang dengan pasir. Pinggiran kota padaumumnya terdiri dari tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota pekanbaru

dilewati oleh sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai, antara lain : Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Ago, Sungai Senapelan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

C. Sejarah Singkat Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan Pemakaman yang dulunya merupakan instansi vertikal yang disebut dengan pegawai pusat, yang diperbentukkan di daerah. Dimana sejarah instansi ini terbentuk pada tahun 1974, pada waktu itu “Belanda masih ingin kembali menjajah Negara Republik Indonesia” terjadilah peperangan antara Belanda dengan TNI, banyaknya rakyat yang mengungsi dan terjadinya kekacauan disana-sini. Untuk membantu angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam rangka evakuasi korban baik TNI maupun masyarakat akibat peperangan.

Manfaat aktifitas dari penyelamatan para korban sangat dirasakan sekali oleh masyarakat, oleh karena itu pemerintah menganggap sangat perlu membentuk lembaga resmi atau institusi yang menangani masalah-masalah sosial di Negara Republik Indonesia, sehingga pada waktu itu dibentuklah suatu lembaga yang disebut Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah. Pada tahun 1990 Inspeksi Sosial di ukur dengan jawatan Sosial yang tugas pokoknya disesuaikan dengan UUD 1945 pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

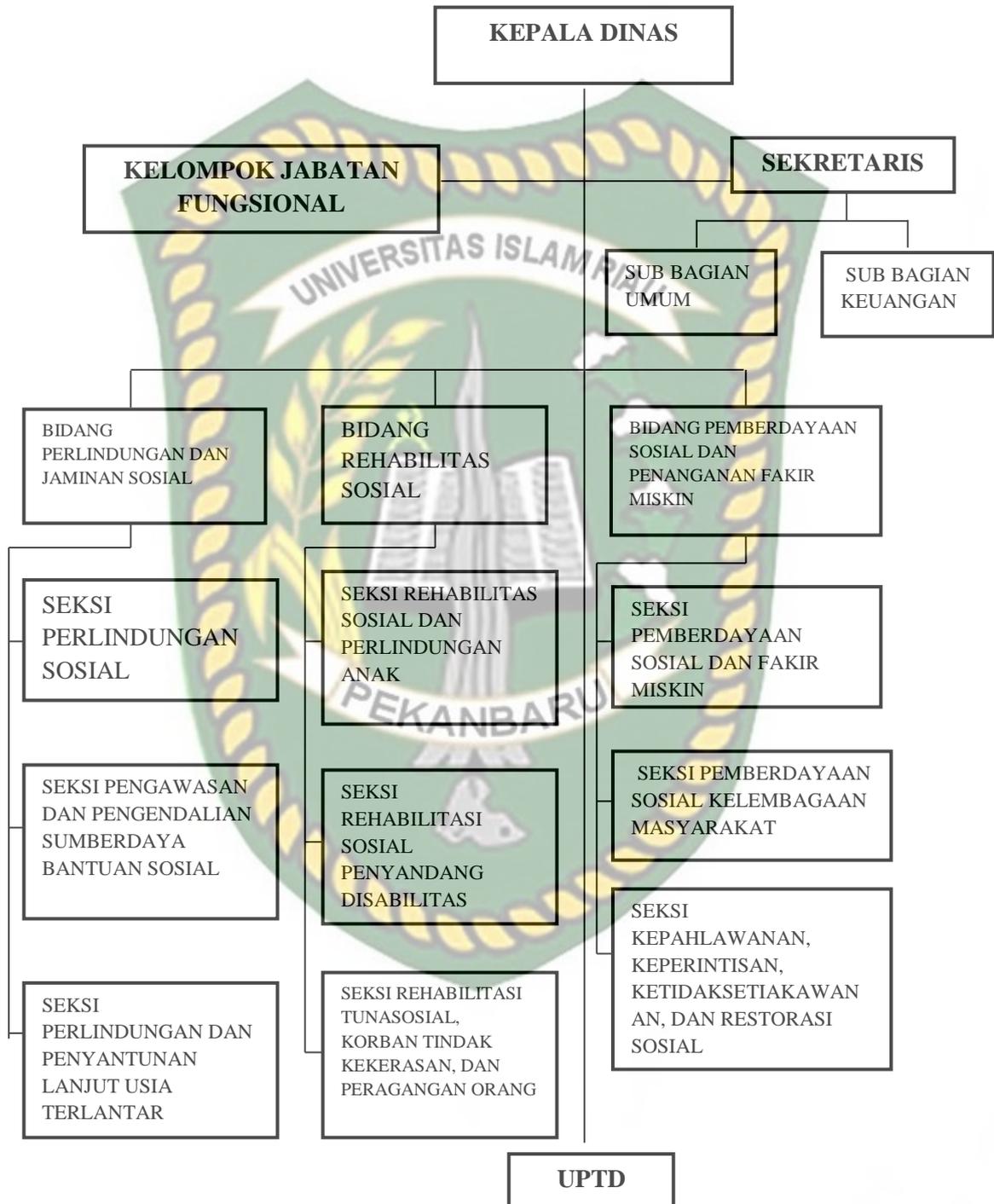
Pada tahun 1974 jawatan Sosial diganti dengan Departemen Sosial RI, untuk tingkat pusat dan provinsi disebut dengan Kantor Wilayah Departemen Sosial dan tingkat Kabupaten/kota dengan kantor Departemen Sosial kabupaten kota, pada tahun 1998, yaitu pada masa reformasi dengan Presiden adalah BJ. Habibie, Departemen Sosial masihtap dan pada tahun 1999, pada masa presiden KH. Abdul Rahman Wahid, Departemen Sosial dibubarkan dan diganti dengan nama “Badan Kesejahteraan Sosial Nasional” (BKSNN). Dan pada tahun 2000 diganti lagi namanya dengan departemen Sosial dan Kesehatan RI.

Pada tahun 2001 sejak Presiden Megawati Soekarno Putri, departemen Sosial RI hidup kembali. Dan untuk kota Pekanbaru sesuai dengan peraturan daerah no & tahun 2001 tentang Srtuktur organisasi dan tata kerja dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

D. Struktur Organisasi dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Struktur organisasi merupakan suatu sistem pembagian tanggung jawab, wewenang serta penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan ini hendaknya dicapai semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki walaupun potensi tersebut terbatas. Berikut ini Struktur organisasi Dinas sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Gambar VI.1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2018

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru maka dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Daftar Nama Pegawai Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Nama Anggota	Pendidikan
1	Kepala Dinas	Chairani, S. STP, M.Si	S II
2	Sekretaris	Drs. H. Zamzami, M.Si	S II
	Sub Bagian Umum	Handre Putra, S.Sos	S I
	Sub Bagian Keuangan	Ria Aryani, SH	S I
3	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Langgeng Widodo, SKM	S I
	Seksi Perlindungan Sosial	Nuryusmeiti, SmHK	S I
	Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial	Fajrina, S.IP	S I
	Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar	Roselly Evianty Silalahi, SKM, M.Kes	S II
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	Drs. Bustami, MM	S II
	Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak	Suzzana, S.Sos., M.AP	S II
	Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Wira Sriyanti, S,Pi, M.Si	S II
	Seksi Rehabilitas Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang	Adzani Benazir, S.IP, M.Si	S II
4	Bidang Pemberdayaan Sosial	Hj. Netti Ennita, SH	S I
	Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin	Heryani, S.ST	S I
	Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Nindya Devi Justisianawati, SH	S I
	Seksi Kepahlawanan, Keperintisan Ketidaksetiakawanan dan Restorasi Sosial.	Yennita, S.STP, M.S	S II

Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah dibidang sosial yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah. Berikut merupakan tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1. Merumuskan pengelolaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
2. Membina dan merumuskan kebijakan rencana dan program dibidang sosial dan pemakaman;
3. Membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian di bidang penyuluhan sosial serta pengendalian bantuan sosial;
4. Membina dan merumuskan bimbingan pelayanan dan pengendalian kesejahteraan anak, keluarga dan masyarakat, lanjut usia dan jompo, panti sosial serta bimbingan keluarga miskin;
5. Membina dan merumuskan kegiatan dibidang rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat, anak bermasalah, tuna sosial dan daerah kumuh.

F. Uraian Tugas Bagian, Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Kepala dinas sosial dan pemakaman mempunyai rincian tugas :

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman.
3. Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman;
4. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial dan pemakaman;
5. Membina unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya;
6. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris mempunyai rincian tugas:

1. Penyusun program kerja dinas;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga;
3. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas
4. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan;
5. Pengkoordinasian laporan tahunan;
6. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan mempunyai rincian tugas:

1. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
3. Pengevaluasian tugas administrasi sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
4. Pelaporan tugas sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas:

1. Perencanaan program kerja sub bagian keuangan dinas
2. Pelaksanaan verifikasi;
3. Penyiapan surat perintah membayar;
4. Pelaksanaan akuntansi dinas;
5. Pembagian tugas kepada bawahan;
6. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
7. Pemeriksaan pekerjaan bawahan;
8. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknik;
9. Pengevaluasi tugas;
10. Pelaporan pelaksanaan tugas;
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pinjaman.

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas:

1. Penyusunan program kerja;
2. Pengumpulan data dan informasi
3. Pengendalian dan pelaporan;
4. Pengumpulan petunjuk teknis, perumusan rencana kerja;
5. Penyusunan tindak lanjut laporan pelayanan.

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial mempunyai rincian tugas:

1. Penyusunan program kerja;

2. Pembinaan dan perumusan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial;
3. Pengkoordinasian inventarisasi data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
4. Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari:

1. Seksi kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia;
2. Seksi pemberdayaan keluarga miskin;
3. Seksi lembaga sosial dan penyuluhan sosial;

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai rincian tugas:

1. Penyusunan program kerja
2. Pembinaan lanjut, pelayanan sosial;
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Bidang rehabilitasi sosial terdiri dari:

1. Seksi rehabilitasi anak nakal, eks korban napzandan eks hukum;
2. Seksi rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat;
3. Seksi rehabilitasi tuna sosial;

Bidang bantuan sosial mempunyai rincian tugas:

1. Penyusunan rencana dan program bantuan sosial, advokasi sosial dan perlindungan sosial;
2. Pembinaan, pemberian bantuan dan perlindungan sosial;
3. Pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan;
4. Pengendalian, pengawasan, dan pengumpulan dana bantuan sosial;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Bidang bantuan sosial terdiri dari:

1. Seksi bantuan sosial dan korban bencana
2. Seksi hak asasi manusia, pahlawan dan perintis kemerdekaan;
3. Seksi pengendalian, pengawasan dan pengumpulan dana sosial;

Bidang pemakaman mempunyai rincian tugas:

1. Penyelenggaraan pendaftaran dan pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana penggunaan pemakaman.
2. Pemeliharaan dan penertiban taman pemakaman;
3. Pengadaan lahan pemakaman, penataan pemakaman dan pembuatan peta lokasi pemakaman serta peta penggunaan tanah pemakaman;
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain;

Bidang pemakaman terdiri dari:

1. Pengawasan dan seksi registrasi;
2. Seksi pemeliharaan dan pemanfaatan pemakaman;
3. Seksi pengendalian pemakaman;

G. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Dinas Sosial dan pemakaman Kota Pekanbaru sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota pekanbaru mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

Terwujudnya kesejahteraan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilandasi nilai-nilai kesetiakawanan serta pemkaman yang tertib dan indah.

2. Misi

- a. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
- b. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja;
- c. Mensosialisasikan bantuan kesejahteraan sosial;

- d. Mengembangkan / meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta memberdayakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara optimal dalam pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. Mewujudkan pemakaman yang indah dan tertib.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian dan dalam mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut:

i. **Identitas Responden**

Berdasarkan hal tersebut diatas maka yang menjadi sampel adalah masyarakat pengelola E-Warong dan Masyarakat Penerima Manfaat Kota Pekanbaru, dari hasil pengamatan penelitian dalam pelaksanaan penelitian maka terhadap keseluruhan responden yang digunakan sebagai sampel. Pada bab ini akan diajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasiljawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden.

1. **Tingkat Pendidikan**

Identitas responden dilakukan guna memberikan gambaran mengenai identitas responden para responden yang akan menjawab maksud dan tujuan penelitian ini.

Faktor pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam diri seseorang karena mempengaruhi pola pikir dan tindakannya. Dalam penelitian ini terdapat tingkat pendidikan yang beragam, masyarakat yang akan menjadi responen diperkirakan memiliki tingkat pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, dan Sarjana. Dimana tingkat pendidikan

ini bertujuan guna mengembangkan dan memantapkan kemampuan intelektual, kematangan psikologis dan watak seseorang dalam memberikan jawaban nantinya serta memudahkan peneliti dalam membuat pertanyaan yang sesuai.

Berdasarkan hasil penelitian jenjang pendidikan formal dari seluruh tabel responden penelitian sangat bervariasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.I.: Responden Menurut Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase %
1	SD	6 orang	15%
2	SMP	11 orang	27,5%
3	SMA	21 orang	52,5%
4	Sarjana	2 orang	5%
	Jumlah	40 orang	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2019

Dari tabel V.I di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang dilihat dari tanggapan responden dinilai yang memiliki kemampuan pemahaman yang cukup baik. Hal ini dilihat dari tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah tamatan SMA yang berjumlah 21 orang responden dengan persentase 52,5% .

2. Kelompok umur

Usia dapat menjadi ukuran kematangan atau kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Identitas responden dalam kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2: Jumlah Responden Berdasarkan Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase %
1	20-30	7 orang	17.5 %
2	31-40	13 orang	32.5 %
3	41-50	16 orang	40%
4	>50	4 orang	10%
	Jumlah	40	100%

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa persentase dari jawaban responden yang masing-masing kelompok umur/usia 20-30 tahun sebanyak 7 orang responden atau sebesar 17,5 %. Kelompok umur / usia 31-40 tahun sebanyak 13 orang responden atau sebesar 32,5%, kelompok umur / usia 41-50 tahun sebanyak 16 orang responden atau sebesar 40%, dan kelompok umur / usia >50 sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10%. Artinya usia sebagian besar responden penelitian matang dan seharusnya mereka cukup bijaksana dalam menyelesaikan pekerjaan.

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin masyarakat menjadi pertimbangan yang diberikan sebagai identitas responden. Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 :Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	10%
2	Perempuan	36	90%
	Jumlah	40	100%

Sumber: hasil Penelitian Lapangan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang responden atau sebesar 10% berjenis kelamin laki-laki dan 36 orang atau 90% berjenis kelamin perempuan. Dimana disini dapat dilihat bahwa yang berperan penting sebagai pelaksanaan program yaitu perempuan atau ibu-ibu rumah tangga.

ii. Implementasi Program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) oleh Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

Program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) merupakan upaya penanganan kemiskinan yang terjadi, salah satu program pemerintah dalam Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin seperti dalam “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan”, dan “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai”, Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

5. Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) :

- f. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
- g. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang
- h. Meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan pangan bagi KPM.
- i. Memberikan KPM lebih banyak pilihan dan kendali dalam pemenuhan kebutuhan pangan,
- j. Mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals / SDG's).

Dalam upaya mensejahterakan rakyat pemerintah memberikan program bantuan pangan non tunai yang berupa elektronik warung gotong royong (E-Warong). Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Sasaran / anggota E-Warong KUBE adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bantuan UEP KUBE Kementerian Sosial
- b. Penerima Program PKH
- c. Penerima Program Rastra
- d. Peserta berjumlah 500-1000 anggota KK/KPM
- e. Lokasi 1 kecamatan 1 warung (jika anggota KPM nya antara 500-100 KK).

Maka selanjutnya disini dapat dilihat mengenai implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru yang terdiri dari :

1. Faktor Pendukung

a. Komitmen Pimpinan Politik

Komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk mengarahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas. Dalam prakteknya komitmen dari pimpinan pemerintah sangat diperlukan karena pada hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa. Sesuai dengan salah satu visi kota pekanbaru yaitu “mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera”.

Dalam Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-warong) ini sendiri mempunyai fungsi dan tujuan yang harus dilaksanakan dan dicapai, adapun Adapun Fungsi E Warung KUBE adalah sebagai berikut:

- a. Elemen stabilisasi harga sembako dan menjadi distribusi pangan
- b. E-Warong dimiliki dan dikelola oleh KSM penerima bantuan
- c. Agen bank penyalur Bantuan Sosial Non Tunai
- d. Pemasaran hasil KUBE
- e. Jual sembako murah.

Dan Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhn pangan.
- b. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang
- c. Meningkatkan ketetapan sasaran dan waktu penerimaan pangan bagi KPM.
- d. Memberikan KPM lebih banyak pilihan dan kendali dalam pemenuhan kebutuhan pangan,
- e. Mendorong tercapainya tujuan pembangua berkelanjutan (sustainable depeloment goals / SDG's).

Dinas Sosial Sebagai instansi yang ikut serta dalam melaksanakan Visi Misi Kota Pekanbaru yaitu “mewujudkan

masyarakat yang lebih sejahtera” serta sebagai instansi yang menangani permasalahan dalam pelaksanaan pembentukan E Warong, seperti pada pasal 9 ayat 3 yaitu : “Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi”.

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program tersebut tentang Komitmen Pimpinan Politik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Komitmen Pimpinan Politik dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Pelaksanaan komitmen pemerintah daerah	21 (52,5%)	17 (42,5%)	2 (5)	40 (100%)
2	pelaksanaan Program	14 (35%)	19 (47,5%)	7 (17,5%)	40 (100%)
	Jumlah	35	36	9	80
	Rata-rata	17,5	18	4,5	40
	Persentase	43,75%	45%	11,25%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2018

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Komitmen Pimpinan Politik dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 43,75% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi, artinya Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 18 orang atau 45 % yang disebabkan mereka cukup mengetahui pelaksanaan komitmen pimpinan politik terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 4,5 orang dengan persentase 11,25%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan komitmen Pimpinan Politik kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

"kami sebagai instansi yang ikut melaksanakan program pemerintah ini cukup antusias dan komitmen dalam tercapainya sebuah visi dan misi pemerintah serta dinas itu sendiri, akan tetapi untuk melaksanakan program ini terdapat kendala dari masyarakat itu sendiri yang mungkin menjadi permasalahan yang terjadi tidak sesuai dengan segala aturan dan ketentuan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-warong)" (4 february 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

"dengan adanya program pemerintah ini cukup membantu ekonomi masyarakat, dengan adanya E-Warong KUBE PKH ini ibu-ibu rumah tangga ada

tanggungjawab yang harus dilakukan, seperti menjaga warung dan berdagang. walaupun kadang terdapat permasalahan didalamnya”(22 Januari 2019),.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang telah penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Komitmen Pimpinan Politik dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan cukup terimplementasi. Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jenjang pendidikan SMA dari beberapa kategori jenjang pendidikan responden, dengan usia rata-rata 30-50 tahun dimana data dan informasi yang diberikan bisa di pertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari komitmen pelaksana dalam melaksanakan program yang masih terdapatnya kekurangan terhadap pelaksanaan visi misi yang telah ditentukan, dimana masih terdapatnya E Warong yang sering tutup, bahkan terdapatnya E Warong yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan sangksi yang diberikan kepada masyarakat pengelola E Warong.

b. Kemampuan Organisasi(*organizational capacity*)

Dalam tahap implementasi program hakekatnya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas, seperti yang ditetapkan atau dibebankan pada salah satu unit organisasi.

Bidang yang menjalankan atau yang menangani Program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini adalah bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, yaitu seksi Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No 97 Tahun 2016 pada Pasal 35 yaitu seksi

pemberdayaan sosial keluarga miskin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 menyelenggarakan fungsi:

- g. Menyusun program kerja
- h. Pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin;
- i. Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif dan bantuan pengembangan usaha keluarga binaan sosial;
- j. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- k. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan Program Bantuan Keluarga Miskin;
- l. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program tersebut tentang Kemampuan Organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.5 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Kemampuan Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			jumlah
		terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Mampu melaksanakan tugas	16 (40%)	21 (52,5%)	3 (7,5%)	40 (100%)
2	mampu mengatasi permasalahan	24 (60%)	16 (40%)	0 (0%)	40 (100%)
	Jumlah	40	37	3	80
	Rata-rata	20	18,5	1,5	40
	Persentase	50%	46,25%	3,75%	100%
	Standar pengukuran	67-100%.			

Kriteria	Terimplementasi
----------	-----------------

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Kemampuan Organisasi dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 50% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi, artinya Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 18,5 orang atau persentasenya 46,25 % yang disebabkan mereka cukup mengetahui pelaksanaan kemampuan organisasi terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 1,5 orang dengan persentase 3,75%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan kemampuan organisasi kurang terlaksana atau terimplementasi bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“selama ini kami Dinas Sosial sudah mengupayakan agar masyarakat dan pengelola E-Warong dapat merasakan manfaat dari program pemerintah ini yang bertujuan untuk membantu kesejahteraan perekonomian masyarakat, akan tetapi masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan, salah satunya yaitu masyarakat pengelola E-Warong yang melakukan pelanggaran, seperti hanya buka warung sebulan sekali saat pembagian bantuan saja. Namun hal ini akan segera di atasi atau diberikan solusi dari kami agar warung berjalan dengan semestinya” (4 februari 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warung berdasarkan wawancara peneliti:

“permasalahan jarang buka warung terjadi karena ada permasalahan didalam kesalahan dalam pengelolaan keuangan untung rugi itu sendiri”(22 Januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Kemampuan Organisasi dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jejang pendidikan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 tahun dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan mengatasi permasalahan yang terjadi sudah dilakukan sesuai keinginan manyarakat, namun terlepas dari hal itu masih terdapatnya permasalahan yang terjadi seperti seperti E-Warung yang hanya buka warung sebulan sekali saat pembagian bantuan saja, hal ini menyebabkan tidak adanya perputaran modal yang diberikan pemerintah terhadap kemajuan usaha yang dijalankan. Namun hal ini akan segera di atasi atau diberikan solusi dari pihak Dinas Sosial agar warung tetap berjalan dengan semestinya.

c. Komitmen Para Pelaksana

Komitmen adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk mengarahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas.

Dalam hal ini para pelaksana program yaitu Dinas Sosial, Pihak Swasta dan Masyarakat. Sesuai dengan visi dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemakaman yang indah dan tertib”. Salah satu asumsi yang sering kali terbukti keliru ialah jika pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan segera ikut.

Tabel V.6 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Omitmen Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	selalu turun kelapangan	22 (55%)	18 (45%)	0 (0%)	40 (100%)
2	Tanggap dalam pelaksanaan program	12 (30%)	19 (47,5%)	9 (22,5%)	40 (100%)
	Jumlah	34	37	9	80
	Rata-rata	17	18,5	4,5	40
	Persentase	42,5%	46,25%	11,25%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Komitmen Para Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 42,5% persentase masyarakat yang

menatakan terimplementasi, artinya Komitmen Para Pelaksana pada Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 18,5 orang atau 46,25 % yang disebabkan mereka cukup mengetahui pelaksanaan komitmen para pelaksana terhadap program yang dilaksanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 4,5 orang dengan persentase 11,25%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan komitmen para pelaksana kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“dalam melaksanakan program ini, kami pihak dinas selalu turun kelapangan untuk memantau E-Warung sekurangnya 3 bulan sekali, ketika terjadi permasalahan didalam E-Warung pihak dinas selalu melakukan pemanggilan dan diskusi kepada penyelia E-Warung terkait penyebab dan solusi permasalahan yang terjadi” (4 februari 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

“pihak dinas tiga bulan sekali melakukan pengawasan kepada kami, ketika ada masalah maka kami menghubungi bapak yang selaku penyelia untuk menginformasikan kepada dinas”(23 Januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Kemampuan Organisasi dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemukiman Kota Pekanbaru dikatakan Cukup terimplementasi, Hal ini

dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jenjang pendidikan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan komitmen pelaksana dalam pelaksanaan program dan turun kelapangan saat terjadi permasalahan menurut masyarakat dinas Sosial sudah melaksanakan tugasnya, tetapi masih terdapatnya permasalahan yang masih lambat diatasi ketika terjadinya pelanggaran dalam E-Warong yang menyebabkan kurang berjalannya E-Warong dengan semestinya, membuat msyarakat sekitar enggan berbelanja karena kurang tersedianya bahan kebutuhan di warung tersebut.

d. Dukungan kelompok kepentingan (*interest group support*),

Pelaksanaan kebijakan lebih sering mendapat dukungan dari kelompok kepentingan dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan. Seperti dinas sosial, pihak swasta, dan masyarakat yang bekerjasama dalam pencapaian tujuan.

Tabel V.7 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Dukungan Kelompok Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	masyarakat sebagai kelompok kepentingan	21 (52,5%)	19 (47,5%)	0 (0%)	40 (100%)
2	kelompok kepentingan	9 (22,5%)	23 (57,5%)	8 (20%)	40 (100%)

	dalam Program				
	Jumlah	30	42	8	80
	Rata-rata	15	21	4	40
	Persentase	37,5%	52,5%	10%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Dukungan Kelompok Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 37,5% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi, artinya Dukungan Kelompok Kepentingan pada Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 21 orang atau 52,5 % yang disebabkan mereka cukup mengetahui pelaksanaan Dukungan Kelompok Kepentingan terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 4 orang dengan persentase 10%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan Dukungan Kelompok Kepentingan kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

“kelompok kepentingan seperti pihak Bank, Dinas, dan masyarakat sudah pasti ingin Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) ini terlaksana dengan baik, selain berdampak positif bagi msayarakat juga memberikan keuntungan kepada Bank, pihak dinas sudah melakukan yang semestinya, ketika terjadi

permasalahan, itu terjadi karena kelompok kepentingan masyarakat sebagai tujuan program itu dilaksanakan” (4 februari 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

“pihak Bank merupakan penyalur dana dan Dinas merupakan pengawas kami sebagai pengelola E-warong, sementara waktu ini pihak dinas dan bank cukup memberi pelayanan baik kepada kami, namun kadang ada keterlambatan penyaluran dana untuk masyarakat penerima manfaat kemungkinan itu dari pusat”(22 Januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Dukungan Kelompok Kepentingan dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan Cukup terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jejang pendidikan SMP dan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan dukungan kelompok kepentingan dalam pelaksanaan sangat berperan penting dalam pelaksanaan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong), masyarakat sebagai salah satu kelompok kepentingan dan menajadi sasaran utama program tersebut masih ada yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan dana yang diberikan untuk keperluan tertentu. Serta pihak Bank dan Dinas Sosial yang selaku kelompok kepentingan lainnya yang ikut serta mengawasi dan memantau pelaksanaan program.

Berikut merupakan faktor Pendorong dalam Implementasi Kebijakan bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota

Pekanbaru yang penulis peroleh berdasarkan pendapat masyarakat atau keluarga penerima Manfaat dari Program :

Tabel V.8 Distribusi Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Faktor Pendorong dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Komitmen Pimpinan Politik	17,5	18	4,5	40
2	Kemampuan organisasi	20	18,5	1,5	40
3	Komitmen para pelaksana	17	18,5	4,5	40
4	Dukungan kelompok kepentingan	15	21	4	40
	Jumlah	69,5	76	14,5	160
	Rata-rata	17,4	19	3,6	40
	Persentase	43,75%	47,5%	9%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat diketahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah dari 40 orang yang dijadikan responden

sebanyak 17,4 orang atau 43,5% menyatakan terimplementasi, sebanyak 19 orang atau 47,5% menyatakan cukup terimplementasi dan sebanyak 3,6 orang atau 9% menyatakan kurang terimplementasi.

Dari hasil rekapitulasi Indikator Faktor Pendukung responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dinyatakan Cukup Terimplementasi dengan hasil rekapitulasi tanggapan responden sebanyak 19 orang atau 46,8% hal ini dilihat dari 4 item penilaian yang telah penulis tetapkan. Dengan beberapa item penilaian tersebut penulis menemukan bahwa terdapat hal positif yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan sosial Non Tuai (E-Warong) ini untuk kesejahteraan masyarakat serta membantu kehidupan masyarakat kurang mampu. Namun ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh dinas sosial yaitu agar bisa lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap pengelola E-Warong demi tercapainya sebuah program.

2. Faktor penghambat (*impeding conditions*).

a. Aktor Yang Terlibat

Banyaknya aktor yang terlibat, semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan semakin besar kemungkinan terjadi hambatan dalam proses pelaksanaan. Banyaknya aktor yang terlibat seperti masyarakat, pihak swasta,

dan pemerintah lainnya sebagai orang yang ikut serta dalam pelaksanaan Program.



Tabel V.9 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Aktor Yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	kerumitan dalam pelaksanaan program	12 (30%)	20 (50%)	8 (20%)	40 (100%)
2	mengatasi segala hambatan dan permasalahan	11 (27,5%)	19 (47,5%)	10 (25%)	40 (100%)
	Jumlah	23	39	18	80
	Rata-rata	11,5	19,5	9	40
	Persentase	28,75%	48,75%	22,5%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.4 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Aktor Yang Terlibat dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang

yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 28,75% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi atau sebanyak 11,5 orang, artinya Aktor Yang Terlibat pada Program Bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 19,5 orang atau 48,75 % yang disebabkan mereka cukup mengetahui pelaksanaan Aktor Yang Terlibat terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 9 orang dengan persentase 22,5%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan Aktor Yang Terlibat kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“kerumitan yang terjadi pada aktor yang terlibat seperti pihak bank, Instansi, dan masyarakat tidak begitu menjadi penghambat pelaksanaan, hal biasa saat pengurusan awal ketika masyarakat ingin membuka E-Warong. Namun, ketika terdapatnya E-Warong yang tidak berjalan sesuai ketentuan, itu menjadi hal agak rumit bagi dinas untuk menemukan solusi permasalahan terhadap masyarakat”. (4 februari 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

“kerumitan terjadi ketika pada awal ingin membuka warung, sudah biasa proses seperti ini, kemungkinan terjadinya kerumitan di warung ini yaitu saat pembagian piket dimana terdapat perubahan orang, ibu-ibu yang dulu bagian dari Kelompok ada yang sekarang bekerja dan ada kepentingan lain ini yang memjaadi permaslaahan saat ini” (22 januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya aktor yang terlibat dalam Impelementasi

Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemukiman Kota Pekanbaru dikatakan Cukup terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jenjang pendidikan smp dan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 tahun dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program cukup terlaksana, hal ini dilihat dari apakah terjadi kerumitan dalam pelaksanaan dan segala hambatan yang terjadi bisa diatasi oleh Dinas Sosial sebagaimana mestinya. Namun hal biasa jika terjadi kerumitan dalam pengurusan awal untuk membuka E-Warong KUBE PKH ini, segala hambatan yang terjadi karena kurangnya kerjasama kelompok E-Warong untuk tetap mempertahankan E-Warong agar bisa tetap buka dan berjualan setiap hari.

b. Komitmen atau Loyalitas Ganda

Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda, seperti dalam banyak kasus terjadi, pihak yang terlibat maupun seseorang yang seharusnya ikut berperan demi keberhasilan dalam menentukan ataupun menyetujui suatu proyek dalam pelaksanaannya masih mengalami penundaan karena adanya komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas-tugas lainnya atau program lain, hal ini disebabkan adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi sehingga perhatian pelaksana menjadi terpecah.

Tabel V.10 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Komitmen atau Loyalitas Ganda dalam Implementasi

Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	keberhasilan Program	17 (42,5%)	18 (45%)	5 (12,5%)	40 (100%)
2	penundaan pelaksanaan	22 (55%)	18 (45%)	0 (0%)	40 (100%)
	Jumlah	39	36	5	80
	Rata-rata	19,5	18	2,5	40
	Persentase	48,75	45%	6,25%	100%
	Standar pengukuran	67-100%.			
	Kriteria	Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.9 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Komitmen atau Loyalitas Ganda dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 38,75% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi, artinya Komitmen atau Loyalitas Ganda pada Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 18 orang atau 45 % yang disebabkan mereka cukup mengetahui Komitmen atau Loyalitas Ganda terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 2,5 orang dengan persentase 6,25%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini

berdasarkan Komitmen atau Loyalitas Ganda kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“terdapat beberapa program dalam pemberdayaan fakir miskin yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, agar kehidupan masyarakat kurang mampu menjadi lebih baik, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai BNPT, atau E-Warong KUBE PKH ini, semua menjadi prioritas kami karna ini menjadi salah satu visi misi kami. Namun ketika terjadinya suatu hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program kami selalu mencari solusi agar bisa mengatasi permasalahan tersebut, karna program yang ada merupakan program dari pemerintah pusat yang sudah ada aturan dan ketentuan pelaksanaan”. (4 februari 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

“bagi kami yang tidak ada permasalahan apa-apa mungkin ini dikatakan sangat bermanfaat untuk perekonomian ibu-ibu disini”. (22 Januari 2019).

“penundaan terjadi karena kami masih dalam proses perbaikan, kami tutup sebentar karena ada masalah yang sedang diselesaikan”.(23 januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Komitmen dan Loyalitas Ganda dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jejang pendidikan SMA, dengan usia rata-rata 30-50

dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan komitmen dan Loyalitas Ganda dalam pelaksanaan program sudah terlaksana dengan baik, ketika terjadinya hambatan dan permasalahan pihak Dinas Sosial akan melakukan pertemuan kepada penyelia E-Warong dan melakukan diskusi untuk memberikan solusi.

c. Kerumitan

Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri dalam hal ini berupa faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan bahan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.

Tabel V.11 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Kerumitan dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			jumlah
		terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	mengatasi kemungkinan terjadi	14 (35%)	16 (40%)	10 (25%)	40 (100%)
2	Pengawasan	21 (52,5%)	18 (45%)	1 (2,5%)	40 (100%)
	Jumlah	35	34	11	80
	Rata-rata	17,5	17	5,5	40
	Persentase	43,75	42,5%	13,75%	100%
	Standar pengukuran	67-100%.			

Kriteria	Terimplementasi
----------	-----------------

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.10 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 43,75% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi atau rata-rata 17,5 orang, artinya Kerumitan pada Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 17 orang atau 42,5% yang disebabkan mereka cukup mengetahui Kerumitan terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 5,5 orang dengan persentase 13,75%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan Kerumitan kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“Kerumitan yang kemungkinan terjadi berupa faktor ekonomi masyarakat yang sering terjadi dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program E-Warong PKH” (4 february 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

“permasalahan kami saat ini adalah dalam kelompok kami sendiri, diakrenakan tidak adanya jiwa berdagang sehingga warung tidak berjalan dengan baik, sampai adanya kesibukan anggota kelompok yang membuat tidak ada waktu menjaga warung, tapi mudah-mudahan kerumitan ini akan segera teratasi” (22 Januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jejang pendidikan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 tahun dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan dalam mengatasi kemungkinan terjadinya permasalahan serta pengawasan terhadap pengelola E-Warong.

d. Jenjang Pengambilan Keputusan

Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, makin banyak jenjang dan tempat pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana program dilaksanakan. Demikian pula pada tahap operasi, penyaluran dana dan sumbangan yang diperlukan, memakan banyak waktu karena memerlukan persetujuan dari banyak pihak.

Tabel V.12 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Jenjang Pengambilan Keputusan dalam Implementasi

Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Waktu	22 (55%)	18 (45%)	0 (0%)	40 (100%)
2	Tindakan	19 (47,5%)	21 (52,5%)	0 (0%)	40 (100%)
	Jumlah	41	39	0	80
	Rata-rata	20,5	19,5	0	40
	Persentase	51,25%	48,75	0	100%
	Standar pengukuran	67-100%.			
	Kriteria	Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.11 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Jenjang Pengambilan Keputusan dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 51,25% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi atau rata-rata 20,5 orang, artinya Jenjang Pengambilan Keputusan pada Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar. Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 19,5 orang atau 48,75% yang disebabkan mereka cukup mengetahui Jenjang Pengambilan Keputusan terhadap program yang dilakanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 0 orang, artinya tidk ada orang yang menyatakan program Bantuan

Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan Jenjang Pengambilan Keputusan kurang bahkan sama sekali belum terlaksana.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“waktu pemberian atau pencairan dana E-Warong yang berjumlah 30 juta itu diberikan secara bertahap, mulai dari pembelian alat atau perlengkapan warung hingga bahan yang akan dijual. Tidak ada kendala akan hal itu” (4 february 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

”waktu pencairan dana langsung oleh dinas saat membuka E-warong itu bertahap dan tidak ada permasalahan yang menonjol, namun kadang terjadinya keterlambatan pencairan dana masyarakat penerima manfaat BPNT itu sendiri, kemungkinan keterlambatan itu langsung dari pusat dan pihak Bank hanya perantara fasilitas” (23 Januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Jenjang Pengambilan Keputusan dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jejang pendidikan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 dimana data yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Serta dilihat dari pendapat masyarakat yang mengatakan Jenjang Pengambilan Keputusan saat tahap operasi dan penyaluran dana diperlukan banyak waktu yang berjalan sesuai ketentuan. Diaman diperlukan keputusan dari pusat, pihak Dinas dan Pihak Bank.

e. Faktor Lain

Faktor Lain yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan makin panjang waktu yang dibutuhkan dari saat penyusunan rencana dengan pelaksanaan, makin besar kemungkinan pelaksanaan menghadapi hambatan, terlebih jika terjadi perubahan kebijakan.

Tabel V.13 Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Faktor Lain dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kategori penilaian			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup Terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	cepat dan tanggap	12 (30%)	18 (45%)	10 (25%)	40 (100%)
2	memberikan informasi	16 (40%)	20 (50%)	4 (10%)	40 (100%)
	Jumlah	28	38	14	80
	Rata-rata	14	19	7	40
	Persentase	35%	47,5%	17,5%	100%
	Standar pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber: data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.12 diatas dapat diketahui tanggapan responden dari Tanggapan Dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Mengenai Faktor Lain dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah 40 orang yang dijadikan sebagai responden, sebanyak 35% persentase masyarakat yang menatakan terimplementasi atau rata-rata 14 orang, artinya Faktor Lain pada Program bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang ada secara benar.

Selanjutnya yaitu cukup terimplementasi dinyatakan rata-rata 19 orang atau 47,5% yang disebabkan mereka cukup mengetahui Faktor Lain terhadap program yang dilaksanakan, sedangkan yang menyatakan kurang baik rata-rata ada sebanyak 7,5 orang dengan persentase 17,5%, yang disebabkan program Bantuan Sosial Non Tunai (E Warong) ini berdasarkan Faktor Lain kurang bahkan sama sekali belum terlaksana sesuai ketentuan.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dan Fakir Miskin adalah sebagai berikut:

“ketika terjadi perubahan ketentuan dari pusat atau informasi yang memungkinkan penting bagi masyarakat, pihak dinas selalu cepat dalam menginformasikan kepada penyelia atau pengelola E-Warong, agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan informasi maka dari itu pihak dinas selalu meninformasikan via telepon” (4 februari 2019).

Serta tanggapan salah satu masyarakat pengelola E-Warong berdasarkan wawancara peneliti:

”segala informasi dan perubahan apapun itu langsung diinformasikan pihak dnas kepada kami, kadang perantara penyelia kami, ini tidak ada masalah” (24 Januari 2019).

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang penulis paparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Faktor Lain dalam Impelementasi Kebijakan Program Bnatuan Sosial Non Tunai oleh Dinas Sosial dan pemekaman Kota Pekanbaru dikatakan Cukup terimplementasi, Hal ini dilihat dari jenjang pendidikan responden yang cukup baik yaitu berada pada jejang pendidikan SMP dan SMA, dengan usia rata-rata 30-50 tahun dimana data yang diberikan bisa

dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh peneliti. Faktor Lain ini terjadi karena adanya kelalaian masyarakat dalam menerima informasi sehingga masyarakat beranggapan segala sesuatu yang terjadi kemungkinan ada toleransi dari pemerintah, padahal segala kemungkinan terjadinya permasalahan itu sendiri berdampak kepada pendapatan warung yang dikelola masyarakat itu sendiri.

Berikut merupakan faktor Pendorong dalam Implementasi Kebijakan bantuan Sosial Non Tunai (Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru yang penulis peroleh berdasarkan pendapat masyarakat atau keluarga penerima Manfaat dari Program:



Tabel V.14 Distribusi Tanggapan Responden mengenai Faktor Penghambat Tentang Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
5	Aktor yang terlibat	11,5	19,5	9	40
6	Terdapatnya Komitmen	19,5	18	2,5	40

	atau Loyalitas Ganda				
7	Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan	17,5	17	5,5	40
8	Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak	20,5	19,5	0	40
9	Faktor Lain	14	19	7	40
	Jumlah	83	93	24	360
	Rata-rata	16,6	18,6	4,8	40
	Persentase	41,5%	46,5%	12%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat diketahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah dari 40 orang yang dijadikan responden sebanyak 16,6 orang atau 41,5% menyatakan terimplementasi, sebanyak 18,6 orang atau 46,5% menyatakan cukup terimplementasi dan sebanyak 4,8 orang atau 12% menyatakan kurang terimplementasi.

Dari hasil rekapitulasi responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dinyatakan Cukup Terimplementasi dengan hasil rekapitulasi tanggapan responden sebanyak 18,6 orang atau 46,5 % hal ini dilihat dari 5 item penilaian yang telah penulis tetapkan

sebagai Faktor Penghambat Implementasi kebijakan program, yaitu Aktor yang terlibat, Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda, Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, Faktor lain.

Tabel V.15 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Terimplementasi	Cukup terimplementasi	Kurang Terimplementasi	
1	Faktor Pendorong	17,4	19	3,6	40
2	Faktor Penghambat	16,6	18,6	4,8	40
	Jumlah	34	37,6	8,4	360
	Rata-rata	17	18,8	4,2	40
	Persentase	42,5%	47%	10,5%	100%
	Standar Pengukuran	34-66%			
	Kriteria	Cukup Terimplementasi			

Sumber : data olahan tahun 2019

Berdasarkan tabel V.13 diatas dapat diketahui Rekapitulasi Tanggapan Responden Mengenai Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah dari 40 orang yang dijadikan responden sebanyak 17 orang atau 42,5% menyatakan terimplementasi, sebanyak 18,8 orang atau 47% menyatakan cukup terimplementasi dan sebanyak 4,2 orang atau 9,85% menyatakan kurang terimplementasi.

Dari hasil rekapitulasi responden diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Non Tunai (E-

Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dinyatakan Cukup Terimplementasi dengan hasil rekapitulasi tanggapan responden sebanyak 18,8 orang atau 47%, hal ini dilihat dari 2 item penilaian yang telah penulis tetapkan yaitu faktor Pendorong dan Faktor Penghambat.



iii. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasannya yang menjadi faktor pwnghambat dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah:

1. Pengawasan pada masyarakat Pengelola E-warong yang kurang terlaksana, sehingga masyarakat melakukan kecurangan dan pelanggaran yang tidak sesuai.
2. Seharusnya diadakan sosialisasi atau pelatihan tentang berdagang yang baik, yang membuat pengelola E-Warong memiliki pegangan atau ilmu berdagang, sehingga dalam melakukan dagang bisa menguntungkan dan warung tetap berdiri.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat pengelola E-Warong dalam mengemban amanah yang telah diberikan pemerintah untuk menjalankan E-Warong Kelompok Usaha Bersama dengan semestinya dengan hasil yang bermanfaat.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) Oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat dikatakan Cukup Terimplementasi dengan Hasil Rekapitulasi tanggapan responden sebanyak rata-rata 18,8 orang atau 47%. Hal ini dilihat dari 2 Indikator yaitu Faktor Pendorong dan faktor Penghambat, serta dengan 9 Item penilaian yaitu komitmen pimpinan politik, kemampuan organisasi, komitmen para pelaksana, dukungan kelompok kepentingan, Aktor yang terlibat, Terdapatnya Komitmen atau Loyalitas Ganda, Kerumitan Waktu dan perubahan kepemimpinan, Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak, Faktor lain.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Program bantuan Sosial Non Tunai (E-Warong) oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah pengawasan pada masyarakat Pengelola E-warong yang kurang terlaksana dan Kurangnya kesadaran masyarakat pengelola E-Warong dalam mengemban amanah yang telah diberikan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah atau Dinas Sosial untuk mensosialisasikan kebijakan dan atauran yang mengataur Bantuan Sosial Non Tunai(E-Warong) sehingga masyarakat dapat melaksanakan Program tersebut dengan semestinya dan menjadi dampak positif untuk kemajuan perekonomian masyarakat.
2. Diharapkan Dinas Sosial melakukan pengawasan yang rutin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama sehingga terpantau aktivitas E-Warong masyarakat.
3. Diharapkan dinas sosial dengan cepat dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada program E-Warong tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan program bisa tercapai yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Diharapkan Dinas Sosial melakukan sosialisasi atau pelatihan terhadap pengelola E-Warong sehingga pengelola E-Warong mempunyai pembekalan diri dalam berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali Zaini, Raden, *Teori Kebijakan Publik*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru.
- Hadi, Samsul. 2011. *Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta. Lakbang Grafika.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial* Jakarta: salemba Humanika
- Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan–Analisis Kebijakan Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Makmur, H. 2008. *Filsafat Administrasi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins, Stephen. P, 1994. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*, Arcan.
- Rukminto Adi, Isbandi. 2015. *Kesejahteraan Sosial*. Depok: Rajawali Pers.
- Siagian, Sondang P, 2008. *Filsafat Administrasi*, Alfabeta. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Askara
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Public*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto, 2013. *Pengantar Manajemen*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sule, Ernie Tisnawati & Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Bandung: Erlangga.

- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Syukur, Abdullah M. 1988. *Perkembangan dan penerapan studi Implementasi*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara RI.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Public*. Bandung: APII Bandung.
- Tim Penyusun. 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Badan Penerbit FISIPOL. Pekanbaru;UIR.
- Wahab, Solichin Abdul.1997. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Kebijakan ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Westra, Priata. 2002. *Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan & Permasalahan*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Zulkifli, 2005, *Pengantar Ilmu Administrasi Publik dan Manajemen*, Pekanbaru. UIR,Press
- Zulkifli. 2009, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Zulkifli, Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Dokumen :**
 undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
 Undang-undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Jurnal:

1. Lusiana Dalise. 2017. Implementasi Program Jaminan Kesehatan Gratis Daerah di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Ibu selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Implementasi program*. 4-5.

2. Chessy melliani. 2017. Implementasi programn Pengembangan Kawasan Pariwisata danau Poso Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso. Jurnal Ilmu pemerintahan. 6-7



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau